

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Anwas 2014:49).

Oleh karena itu ide pertama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Peran BUMDes didalam pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat, individu atau kelompok yang berada pada titik tidak berdaya untuk segera dan harus diperdayakan. Agar dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Karena pembangunan sosial adalah inti pokok dalam kehidupan sejahtera untuk dapat mengakses kebutuhan mereka dalam melangsungkan kehidupan, dengan prinsip, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sosial.

Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat desa Tempur tentang pentingnya BUMDes dan agar dapat mengembangkan dan menjalankan BUMDes dengan baik untuk mencapai suatu desa yang mandiri dengan mengelola apa yang ada didesa Tempur, seperti mengembangkan pariwisata dan mengelola kopi dengan baik.

2.1.2. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Menurut (Adi, 2013) dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan yang dilaksanakan antara lain :

1 Tahap Persiapan

Dalam tahap ini setidaknya meliputi tahap persiapan tugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (*change agent*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dan tahap persiapan lapangan.

2 Tahap Assesment

Proses assesment merupakan tahapan krusial dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3 Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan.

4 Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubah (*community worker*) membantu masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis.

5 Tahap Pelaksanaan (Implentasi) Program

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari sesuatu yang telah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antar petugas dengan masyarakat, ataupun kerjasama antar warga.

6 Tahap Evaluasi Proses Dan Hasil Perubahan

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7 Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, harapannya adalah masyarakat telah mampu mandiri.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output*, perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.

Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Rostow dan Teori Harrod-Domar

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Transformasi Struktural

Teori ini berfokus pada mekanisme yang membuat negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mentransformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Teori ini dipelopperi oleh W. Arthur Lewis.

c. Teori Solow

Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen.

d. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

e. Teori Pertumbuhan Solow Dengan Unsur *Human Capital*

Teori ini memasukkan unsur *human capital* sebagai unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. *Human capital* berperan sama dengan kapital yang bersifat fisik.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada diatas, bahwasannya terdapat tiga faktor atau komponen dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a). Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b). Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c). Kemajuan teknologi, pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan(*sustainability*).

Adanya BUMDes di desa Tempur diharapkan dapat membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi di desa Tempur, dengan mengelola usaha-usaha yang ada di BUMDes masyarakat diharapkan bisa membantu memajukan desa Tempur. Maka itu perlu adanya pengetahuan yang lebih supaya masyarakat di desa Tempur bisa lebih paham dan mengerti apa itu BUMDes dan bagaimana cara untuk mengelolanya dan memajukannya.

Peran ketua BUMDes dan kepala desa sangat penting dalam melakukan pemahaman terhadap masyarakat desa Tempur supaya bisa tercipta apa sebagaimana apa yang sudah diharapkan untuk menjadi desa yang mandiri dan maju.

2.1.3.1. Indikator Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Desa dikatakan maju atau tidak ditinjau dari keadaan ekonomi, kondisi perkembangan dan kemajuan suatu desa dapat dilihat dari :

1. Perekonomian Utama
2. Ketersediaan Modal
3. Pertumbuhan Penduduk
4. Tingkat Pengangguran Berkurang
5. Pendidikan

6. Kemajuan Teknologi

7. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan ekonomi masyarakat juga bisa dilihat dari :

1. Infrastruktur yang baik seperti jalan.
2. Mempunyai usaha sendiri, seperti perdagangan, jasa dan pertanian
3. Kebutuhan primer, seperti sandang, pangan dan papan terpenuhi.

2.1.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.4.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sejak berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong Desa mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Wacana tentang BUMDes semakin menguat dengan adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang memaksa desa memasuki era *self governing community* dimana desa secara otonom berwenang mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tempur diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada dipedesaan. Sejak berlakunya UU NO. 6 tahun 2014 tentang desa, BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan BUMDes didesa Tempur pemerintah desa mengharapkan adanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan supaya membawa dampak yang baik bagi Desa Tempur.

2.1.4.2. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan, adapun tujuan dalam pendirian BUMDes berdasarkan UU No. 4 tahun 2015 yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa`
2. Mengoptimalkan aset desa
3. Meningkatkan usaha masyarakatdalam pengelolaan potensi ekonomi desa

4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan PADesa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan daei pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepalati

bersama, sehingga tidak menimbulkan distorasi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

2.1.4.3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 sampai Pasal 90.
2. PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 132 hingga Pasal 142.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.1.4.4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes maka BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

4. Transparansi

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6. Sustainable

Kegiatan usaha yang harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Jika seluruh prinsip diatas telah dipegang oleh BUMDes dalam menjalankan usahanya, tentu saja BUMDes dapat menjadi angin segar bagi masyarakat desa. Hal itu lah yang harus semestinya diterapkan dalam BUMDes yang ada di Tempur supaya

bisa lebih mengembangkan usaha dan pengetahuan luas bagi masyarakat tentang pentingnya BUMDes bagi masyarakat desa Tempur sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

2.3. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	METODE	INFORMAN	HASIL
Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto, (2015)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)	Metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>snowball sampling</i>	Pengurus BUMDes, staf desa dan masyarakat	Keberadaan BUMDes membawa dampak yang baik bagi masyarakat di Desa Temurejo. BUMDes yang ada di Desa Temurejo dapat meningkatkan perkenomian dan mensejahterakan desa itu sendiri
Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni	Peranan Badan Usaha Milik Desa	Menggunakan pendekatan <i>Community</i>	Pengurus BUMDes dan staf desa	keberadaan BUMDes membawa perubahan signifikan di bidang

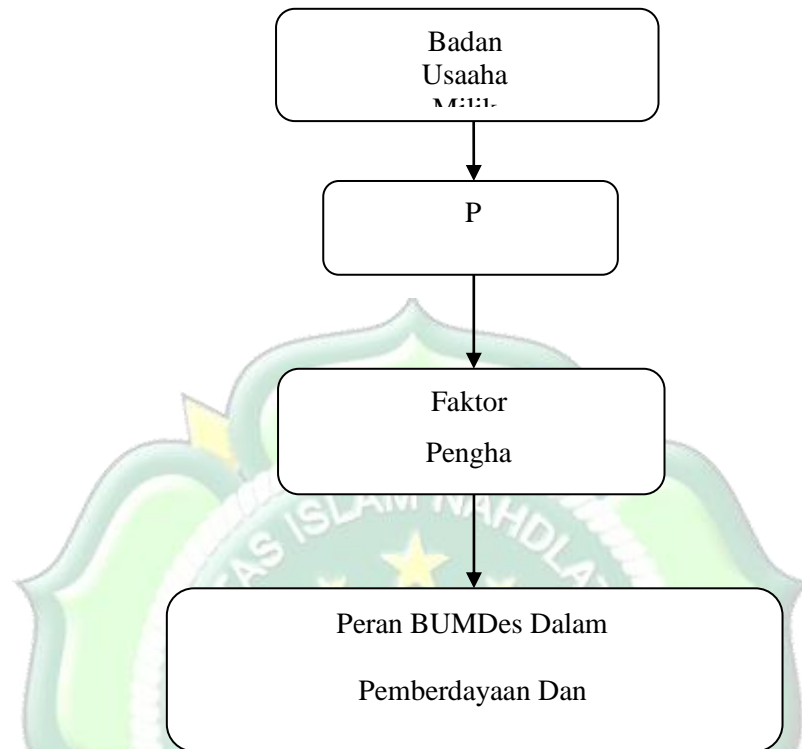
(2016)	(BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta)	<i>Based Research</i> dilakukan secara kualitatif		ekonomi dan sosial, pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka pengelola BUMDes perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi
Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal, (2015)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Pekan Tebih Kecamatan	Metode penelitian kualitatif	Pengurus BUMDes, masyarakat dan staf desa	Hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya BUMDes di desa Pekan Tebih mampu meningkatkan ekonomi masyarakat namun ada juga yang usaha lain yang masih belum bisa berjalan dengan baik.

	Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)			
Rufaidah Aslamiah, Muhammad Izzul Haq,M.Sc (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahtera kan masyarakat Desa Panggunharjo o Melalui kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta	Metode yang digunakan adalah deskriptif- kualitatif	Ketua BUMDes, Pengurus KUPAS, Lurah Desa, Warga Desa	Hasil penelitian ini adalah BUMDes mampu memberi dampak positif bagi warga desa Panggunharjo dan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberi peluang kerja untuk warga desa Panggunharjo

2.4.Kerangka Pemikiran Teoristis (KPT)

Model penelitian dengan kerangka berfikir teoristis mengelola BUMDes dengan memanfaatkan potensi desa yang ada didesa Tempur dan

melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat supaya masyarakat tahu tentang pentingnya BUMDes untuk desa tempur.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoristis (KPT)

Berdasarkan kerangka pemikiran teoristis diatas bahwa BUMDes Desa Tempur memberikan suatu peran yang seharusnya dapat membuat desa Tempur lebih maju. Perlunya peran lembaga ini untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan.

BUMDes Desa Tempur dibentuk berdasarkan adanya kebutuhan dan potensi desa. Sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan mampu memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat miskin. BUMDes diharapkan berperan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian maka adanya BUMDes mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga terciptalah suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa.